

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI KEHUMASAN DI POLRES JEMBER

Eka Nanda Kharisma Putri, M. Thamrin
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata no. 49 Jember
E-Mail: kharismap95@gmail.com

ABSTRACT

This thesis examines what factors that affect Police Chief resorts of Jember in determining policy related to optimizing the function of the Police in the resort PR Jember, the relationship between the function of the PR Department and the unit, and What are factors that affect the function of the PR be optimal in Jember Police Resort. The results obtained form factors that influence policy leadership towards optimizing the function of the Police in the resort PR Jember is the guidelines and regulations of the national police public relations function is composed in the program priorities or work program in accordance with the the region of Jember, advice and input from members who held every Tuesday, the relationships between the parts and the unit because although every section and unit has the task and different programs but still linked and connected, as well as education non-formal sub division of public relations as a complementary skills, and relationships with the mass media are intertwined because it helps in optimizing the function of the PR Police resort to Jember in publicity news relating to the police force or the police resort to Jember.

Keywords: Leadership, Policy Optimization, Pr Functions, Police Resort Jember

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepala Polisi Resor Jember dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan optimalisasi fungsi kehumasan di Polisi Resor Jember, hubungan antara fungsi kehumasan dengan bagian dan satuan yang ada, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi kehumasan menjadi optimal di Polisi Resor Jember. Hasil yang didapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pimpinan terhadap optimalisasi fungsi kehumasan di Polisi Resor Jember adalah pedoman dan peraturan fungsi humas Polri yang tersusun dalam program prioritas atau program kerja sesuai dengan wilayah Jember, saran serta masukan dari anggota yang dilaksanakan setiap hari Selasa, hubungan antar bagian dan satuan karena walaupun setiap bagian dan satuan memiliki tugas dan program yang berbeda tetapi tetap terkait dan terhubung, serta pendidikan non-formal sub bagian humas sebagai penunjang skill, dan hubungan dengan media massa yang terjalin karena membantu dalam optimalisasi fungsi kehumasan Polisi Resor Jember dalam publisitas berita yang berkaitan dengan kepolisian atau Polisi Resor Jember.

Kata kunci : Komunikasi Interpersonal, Komandan, Pendidikan Karakter Belanegara Anggota.

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi acuan dan rencana dalam pelaksanaan suatu langkah pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. (William Dunn; 51-52; 2000) Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. (Ken Blakemore;1998)

Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi bukan berarti sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki

seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen mencakup fungsi kepemimpinan atau pengarahan (*actuating*), tetapi juga mencakup fungsi-fungsi lain seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*) Senada dengan definisi diatas kepemimpinan menurut Robbins dan Judge (2013) adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan definisi pakar di atas, dapat diketahui kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi anggota kelompok agar bekerja menuju pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 2008).

Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Hal ini seringkali disederhanakan atau disingkat sebagai sebuah terjemahan dari istilah Public Relations (PR). Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Humas sendiri merupakan gabungan berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi dan lain-lain. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini humas mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun perkembangan humas dalam setiap negara itu tak sama baik bentuk maupun kualitasnya. Proses perkembangan humas lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks. (sholeh soemirat: 2012).

Keberhasilan humas pada suatu organisasi atau perusahaan pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukan atau dikatakan pimpinan organisasi atau perusahaan bersangkutan. Ketika pimpinan berbuat atau berbicara maka timbul interpretasi publik atas pesan yang disampaikan. Pesan tersebar luas karena adanya fungsi humas. Dengan demikian staf humas terikat dan tidak dapat keluar

dari apa yang telah dikemukakan pimpinan. (morissan, 2008, 91)

Kepolisian Resort Jember atau Polres Jember adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Jember. Polres Jember merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala kepolisian resort yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Kepolisian Resort Jember (Mapolres Jember) beralamat di Jalan Kartini 17, Jember, Jawa Timur. Polres Jember saat ini dipimpin oleh AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Sementara ini, Kasubbaghumas di Polres Jember masih kosong, belum ada reformasi untuk struktur humas. Subbaghumas beranggotakan 12 orang, Kasubbaghumas kosong sejak maret 2017 dan dipimpin oleh PJS (pejabat sementara) AIPDA Hadi purnomo dan kemudian diangkatnya PAUR subbaghumas IPDA Danu Prasetyo.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pimpinan terhadap optimalisasi fungsi humas pada Polres Jember. Jika dilihat fungsi kehumasan yang seharusnya menjadi corong serta mewadahi informasi dari dalam maupun dari luar suatu organisasi atau perusahaan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapolres dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan optimalisasi fungsi kehumasan pada Polres Jember?
2. Bagaimana hubungan antara fungsi kehumasan dengan bagian dan satuan yang ada dalam Polres Jember?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kehumasan menjadi optimal pada Polres Jember?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapolres dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan optimalisasi fungsi kehumasan pada Polres Jember .
2. Mengetahui hubungan antara fungsi kehumasan dengan bagian dan satuan yang ada dalam Polres Jember
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kehumasan menjadi optimal pada Polres Jember.

Hipotesis

1. Peraturan atau Pedoman tugas fungsi humas Polri dan saran serta masukan dari anggota, mempengaruhi Kapolres dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi kehumasan pada Polres Jember
2. Ada hubungan antara fungsi kehumasan dengan bagian dan satuan yang ada dalam Polres Jember
3. Pendidikan non-formal bagi anggota subbaghumas, kerjasama antar bagian dan satuan, serta hubungan dengan media massa, berpengaruh terhadap fungsi kehumasan menjadi optimal pada Polres Jember

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin.

Kebijakan Pimpinan

Kebijakan penggunaannya sering di sama artikan dengan istilah-istilah lain

seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar. Sedangkan menurut perserikatan bangsa-bangsa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global. Dengan demikian pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan di ikuti dan di laksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu dengan memproyeksikan program-program.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III menyatakan bahwa Implementasi sebuah program atau kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengertian Humas

Salah satu bagian organisasi yang memiliki fungsi menjalin hubungan, interaksi, dan kerja sama organisasi baik dari luar maupun dari dalam serta dengan pihak masyarakat yang berkaitan dengan organisasi tersebut agar terciptanya tujuan organisasi.

Ruang Lingkup Humas

Dalam buku "Manajemen Public Relations, strategi menjadi humas profesional karya Morissan menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan humas mencakup enam bidang pekerjaan, yaitu: publisitas, *public affairs*, pemasaran, manajemen isu, lobi, dan hubungan investor.

Fungsi Humas

Dalam buku Public Relations : Teori dan Praktek yang ditulis oleh Djanalis

Djanaid (1993) disebutkan dua fungsi kehumasan yaitu : fungsi konstruktif dan fungsi korektif.

Manfaat humas

Menurut Frank Jefkins (1998:333), manfaat hubungan masyarakat (humas) adalah: manajemen krisis, penerbitan dekstop, identitas organisasi, hubungan parlemen, dan humas finansial.

Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Kepemimpinan dalam Humas

Tugas Pimpinan dalam Organisasi

Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakkan atau kepemimpinan, dan fungsi pengawasan.

Teori Manajemen Humas

Berdasarkan poin-poin dari Grunig dan Hunt dalam pengelolaan sistem humas suatu organisasi, praktisi humas harus membentuk suatu keharmonisan dengan berbagai unsur dalam organisasi itu sendiri: secara fungsi: *the real job* (pekerjaan nyata) dari komponen-komponen suatu organisasi; secara terstruktur: hirarki organisasional individu dan posisi; secara proses: pengambilan keputusan formal tentang peraturan dan prosedur yang terdapat dalam organisasi; dan secara umpan balik mekanisme evaluatif formal dan informal organisasi. (Soeleh Soemirat;87-88; 2012)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dalam masalah ini, lebih ditekankan pada tindakan pimpinan dalam optimalisasi fungsi kehumasan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yang menurut jenisnya dapat dibedakan meliputi :Data primer yaitu: Kapolres Jember, Kabag, Kasi, Kasat, PJS Subbaghumas dan Media Massa. Serta Data Sekunder yang terdiri dari buku harian, note, sampai dokumen-dokumen resmi dari majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil *survey*, studi *histories* dan sebagainya.

Teknik Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive Sampling atau sampling secara bertujuan yakni dilakukan berdasarkan penilaian subyektif peneliti bahwa sampel yang diambil mencerminkan atau representative bagi populasi. Peneliti menentukan sendiri siapa saja sampel penelitian yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Narasumber yang peneliti pilih tentunya memiliki kriteria. Dan, jumlah sampel yang dipilih itu harus ditentukan sebelumnya. Informan yang dipilih sebanyak 27 orang, dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun kriteria dalam menentukan informan diantaranya:

- 1) Kapolres Jember
- 2) Kepala bagian 3 orang
- 3) Kepala seksi 4 orang
- 4) Kepala satuan 8 orang
- 5) Kasubbaghumas (PJS) 1 orang
- 6) Media massa 10 orang

Teknik pengumpulan data

Wawancara, metode dokumentasi, metode observasi, dan studi pustaka.

Teknik analisis data

Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pimpinan terhadap optimalisasi fungsi kehumasan di Polres Jember, penelitian ini dilakukan beberapa informan yaitu, AKBP Kusworo Wiboswo S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Jember, Kabag, Kasi, Kasat, serta PJS subbaghumas sebagai kepala masing-masing satuan dan bagian serta media massa.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Polres Jember hasilnya sebagai berikut :

Pembahasan

1.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapolres dalam Menentukan Kebijakan yang Berkaitan dengan Optimalisasi Fungsi Kehumasan di Polres Jember

Peraturan atau Pedoman Tugas Fungsi Humas Polri : Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwasanya membuat suatu kebijakan dalam fungsi kehumasan memang berdasarkan peraturan dan pedoman akan tetapi untuk mengolah suatu peraturan dan pedoman fungsi humas tersebut harus ada program kerja yang ditentukan guna dapat menjalankan peraturan dan pedoman tersebut, Ketika masyarakat mengenal Polres Jember (Kapolres beserta anggotanya) dan Polres Jember mendapat kepercayaan dari masyarakat maka hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengoptimalkan fungsi kehumasan di Polres Jember.

Saran serta Masukan dari Anggota kepada Kapolres: Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti anggota yang berwenang memberi masukan serta saran kepada Kapolres yaitu Kabag, Kasi, dan Kasat. Untuk anggota dibawah jajaran

tersebut memiliki wewenang pada kepala bagian dan satuannya masing-masing. Sehingga ketika akan memberi masukan mengenai fungsi kehumasan melalui kepala bagian dan satuan terlebih dahulu. Yang kemudian akan disampaikan oleh Kepala bagian dan satuan kepada Kapolres Jember. Tentunya tidak secara langsung diterima oleh Kapolres, akan dipilah terlebih dahulu dan menyaringnya. Semakin banyak anggota membuat kegiatan yang berkenaan langsung dengan masyarakat maka akan semakin mudah saran anggota diterima Kapolres.

Untuk mengoptimalkan fungsi kehumasan di perlukan untuk menerapkan fungsi manajemen yang terbagi 4 fungsi tersebut, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.Hubungan Antara Fungsi Kehumasan dengan Bagian dan Satuan yang Ada dalam Polres Jember

Menurut dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, semakin sering subbaghumas berinteraksi dengan bagian dan satuan mulai dari obrolan biasa sampai tentang pencapaian kinerja maka hubungan antar keduanya akan berjalan baik karena interaksi komunikasi antar keduanya berjalan. Sebaliknya jika jarang berinteraksi atau berkoordinasi maka dapat dipastikan hubungan akan kurang harmonis. Dari data pengamatan yang dilakukan peneliti, bagian dan satuan Polres Jember melakukan koordinasi atau interaksi melalui dua cara yaitu tatap muka dan media sosial. Interaksi atau koordinasi melalui tatap muka ada pertemuan formal dan informal, untuk pertemuan formal ada rapat koordinasi rutin setiap hari selasa dengan Kapolres dan seluruh Kabag, Kasi, serta Kasat, selain itu koordinasi lain menyesuaikan dengan program yang selanjutnya akan dilaksanakan. Lalu untuk pertemuan informal seperti interaksi obrolan santai yang menyangkut koordinasi antar bagian dan satuan, seperti

langsung mendatangi ruang bagian dan satuan yang dibutuhkan ketika memerlukan dokumen atau informasi. Untuk pengumuman mengenai kegiatan keseluruhan anggota Polres Jember, pemberitahuan awal menggunakan media sosial, dan juga melalui Kasium dengan menggunakan pengeras suara dilingkungan Polres Jember sebagai pemberitahuan untuk seluruh anggota.

Sedangkan untuk hasil pelaporan informasi yang telah tersusun dalam bentuk file atau *softcopy* maka cukup dengan membagikan melalui media sosial jika posisi antar bagian dan satuan tidak memungkinkan untuk menemui secara langsung, jika harus melalui tatap muka akan kurang efektif, karena tahap untuk bertatap muka harus saling bertemu, mengingat dari banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan dari masing-masing bagian dan satuan akan memakan waktu yang cukup lama. Otomatis dengan cara berkoordinasi atau komunikasi seperti menyesuaikan koordinasi yang akan dilalui, dengan bertemu langsung atau hanya melalui media sosial saja, maka berpengaruh terhadap optimalnya fungsi kehumasan.

3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kehumasan Menjadi Optimal di Polres Jember

Pendidikan Non-Formal Anggota Subbaghumas: Menurut dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, menjadi dalam anggota subbaghumas juga harus menempuh pendidikan non-formal khusus kehumasan. Yang telah terdapat pada program Promoter Kapolri yaitu manajemen media. Dengan adanya manajemen media tersebut dapat diambil point dari *commander wish* yaitu pendekatan terhadap media mainstream, pengelolaan media sosial, penggunaan intelijen media, pengangkatan berita negatif, kecepatan respon dan menetralkan sentimen negatif serta mengelola *tranding topics*. Maka dari itu perkembangan pencapaian kinerja Polri dapat diketahui oleh masyarakat dengan tepat.

Subbaghumas yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres dan meliputi, memantau, memproduksi, mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bagi anggota subbaghumas sangat penting dan diperlukan guna sebagai efektifitasnya kegiatan kehumasan Polres Jember, akan tetapi ada beberapa pelatihan dalam bidang teknik informatika yang masih kurang, dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan RTIK. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya pendidikan non-formal atau pelatihan bagi anggota subbaghumas Polres Jember maka akan sangat berpengaruh terhadap optimalnya fungsi kehumasan di Polres Jember karena dengan adanya pelatihan khusus atau pendidikan non-formal juga sebagai penunjang skill anggota subbaghumas dalam optimalnya fungsi kehumasan tersebut.

Kerjasama Antar Bagian dan Satuan: Menurut peneliti kerjasama dalam hal ini yang dibentuk dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar bagian dan satuan dalam program kerja. Saling membutuhkan, karena salah satu sebagai penyedia fasilitas (ruang rapat, jaringan internet, transportasi, anggaran dan lain sebagainya) serta sebagai penyedia informasi (laporan dan data) pada masing-masing bagian dan satuan. satuan dan bagian yang ada di Polres Jember sama-sama menjadi penyedia satu sama lain. Baik penyedia fasilitas maupun penyedia informasi dan laporan guna untuk mencapai program kerja yang sudah ditetapkan. Bagian dan satuan saling bekerjasama dalam bertugas meski program kerja yang berbeda satu sama lain tetapi saling terhubung dan membutuhkan. Dengan begitu merasa saling membutuhkan dan dibutuhkan dalam kerjasama maka akan tercipta pencapaian

tugas yang baik sehingga fungsi kehumasan menjadi optimal.

Hubungan dengan Media Massa: Dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa secara tertulis atau MoU subbaghumas Polres Jember tidak memiliki kerjasama khusus dengan media massa, melainkan hubungan antar keduanya dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi sangat berkaitan. Sehingga Polres Jember membutuhkan media sebagai penyampaian berita dan hasil pencapaian kinerja sedangkan media massa memerlukan dasar informasi sebagai acuan pemuatan berita yang berkaitan dengan pihak kepolisian. Semakin sering dan semakin berbobot media massa mempublikasikan tentang berita kriminalitas atau berita yang menyangkut kepolisian yang ada di kabupaten Jember maka akan semakin sering pula pemberitahuan hasil-hasil dari pihak Polres Jember. semakin baik kinerja Polres Jember maka akan semakin terekspos di media dan masyarakat juga akan mengetahui. Karena Polres Jember semakin meningkat hasil pencapaian kinerja serta prestasi yang di dapat maka dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan media massa atau pers berpengaruh terhadap optimalnya fungsi kehumasan di Polres Jember.

KSIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya peranan Kapolres dalam organisasi kepolisian tingkat wilayah kabupaten itu sangatlah penting karena keberadaan Kapolres yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam pencapaian keberhasilan. Salah satu tugas atau peran Kapolres yaitu harus bisa mengelola satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Tidak terlepas dari itu semua peran Kapolres tentunya melalui

faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebijakannya. Yang menjadi faktor utama dalam pencapaian tugas adalah optimalnya fungsi kehumasan di Polres Jember, yang di dasarkan pada Pedoman dan Peraturan Tugas Fungsi Kehumasan Polri. Karena tanpa adanya itu tidak ada acuan dalam menjalankan tugas Polri dengan baik yang dikemas dalam program kerja prioritas pada wilayah kabupaten Jember. Bahkan Untuk mengelola semua itu tentunya tidak terlepas dari saran serta masukan dari anggotanya. Hubungan yang ada didalam satuan organisasi Polres pun juga sangat berpengaruh, tanpa hubungan yang terkait tugas-tugas Polri tidak akan dapat dilaksanakan. Semakin baik koordinasi antar bagian dan satuan maka fungsi kehumasan akan semakin optimal. Faktor yang berpengaruh lainnya yaitu Pendidikan Non-Formal yang ditempuh oleh anggota Subbaghumas Polres Jember sebagai sumberdaya manusia yang dimiliki subbaghumas untuk meningkatkan kinerja, kerjasama antar Satuan dan Bagian di Polres Jember dalam pelaksanaan tugas, dan Hubungan dengan Media Massa atau Pers guna saling bertukar informasi.

Adapun kesimpulan dari masing-masing hipotesis dan pembahasan peneliti berikut ini:

1. Pedoman atau Peraturan Fungsi Humas Polri serta saran atau masukan dari anggota yang terbentuk dalam program prioritas berpengaruh terhadap kebijakan optimalisasi fungsi kehumasan apabila Kapolres atau Pimpinan menerapkan Fungsi Manajemen, Yaitu Fungsi Perencanaan (*Planning*), Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*), Fungsi Penggerakkan (*Actuating*) dan Fungsi Pengontrolan (*Controlling*)
2. Hubungan antar Bagian dan Satuan Polres Jember sangat berpengaruh, karena tanpa adanya hubungan yang terkait satu sama lain, pencapaian kerja tidak akan

maksimal. Semakin bagus koordinasi maka fungsi kehumasan akan menjadi optimal.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pimpinan terhadap optimalisasinya fungsi kehumasan tidak luput dari pendidikan non-formal anggota subbaghumas, kerjasama antar bagian dan satuan yang ada di Polres Jember dan hubungan dengan media massa atau pers.

Saran

Hasil penelitian yang telah di lakukan di Polres Jember dalam penelitian masih memerlukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, sehingga dapat memenuhi syarat untuk dijadikan literatur kajian pustaka. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan-pendekatan lainnya agar masyarakat juga tahu pencapaian kinerja Polres Jember.
2. Sebagai masyarakat pada umumnya kita juga harus saling mendukung tugas-tugas Polri, terutama Polres Jember yang lebih dekat dengan kita karena berada di wilayah kabupaten, agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai.
3. Hasil penelitian ini masih kurang sempurna. Untuk itu, diharapkan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar hasil penelitian lebih baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2016
- Assumpta Rumanti, Sr. Maria. *Dasar-dasar Public relations Teori dan Praktik*. PT Grasindo: Jakarta, 2002.
- Commander Wish Kapolri*. Jakarta: Mabes Polri, 2016

Effendy, Onong Uchjana. *Hubungan Masyarakat. Suatu Study Komunikologis*. Cetakan kelima. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1999.

_____. *Human Relations & Public Relations*. Cetakan kesembilan CV. Mandar Maju: Bandung, 2009.

Gassing, Syarifuddin S. Dan Suryanto. *Public Relations*. C.V Andi Offset: Yogyakarta, 2016

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta, 2003

Herujito, Yayat M. *Dasar-dasar Manajemen*. PT Grasindo: Jakarta, 2001

Hoeta Soehoet, A.M. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yayasan Kampus Tercinta IISIP: Jakarta, 2002

Jefkins, Frank dan Daniel Yadin. *Public Relations*. Edisi Kelima. Erlangga: Jakarta, 1996.

Kahar Haerah. *Materi Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Tidak Diterbitkan, 2015

Moedjiono, Imam. *Kepemimpinan dan Organisasi*. UII Press. Yogyakarta, 2002

Morissan. *Manajemen Public Relations (Strategi Menjadi Humas Profesional)*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2008

Hadiati, Nikmah. *PUBLIC RELATIONS; Perspektif Teoritis Dalam Menjalin Hubungan Dengan Publik*. Lunar Media: Pasuruan. 2010

Ruslan, Rosady. *Manajemen Humas dan Media Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.

Soemirat, Soleh Dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-dasar Public Relations*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005

Yuwono, S. *Kepemimpinan dalam Organisasi Aparatur Pemerintahan*. Liberty. Yogyakarta, 1983.

Sumber lain:

1. <https://riyansaludi.blogspot.com/2015/09/makalah-pengertian-dan-fungsi-kebijakan.html>
2. <https://pramascita.wordpress.com/2013/06/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>
3. <http://jatim.polri.go.id/lambang>
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>
5. <https://dodisyahputra.wordpress.com/2012/04/08/tugas-dan-fungsi-satuan-polri/>